



Aksi Tunggal Warga Berdaya Kritik Kebijakan Pencabutan Moratorium Hotel

Dodok Tempel Tulisan Walihotel Yogyakarta



TRIBUN JOGJA/KURNIATUL HIDAYAH

KRITIKAN - Dodok Putra Bangsa yang mewakili nama Warga Berdaya, melakukan aksi tunggal di depan Kantor Balai Kota Yogyakarta.

Buntut kekecewaan atas kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Yogyakarta terkait moratorium hotel, membawa Dodok Putra Bangsa yang mewakili nama Warga Berdaya, melakukan aksi tunggal di depan Kantor Balai Kota Yogyakarta. Aksi tersebut disebutkannya untuk melibas aura jahat dan bentuk negatif lain yang melekat pada pengayom masyarakat.

SESOSOK pria berambut panjang terikat, mengenakan kaos hitam serta denim selutut mendekati ke arah papan penunjuk identitas Kantor Balai Kota Yogyakarta, Rabu (9/1). Ia mengeluarkan secarik kertas putih, lengkap dengan coretan pena hitam bertuliskan 'HOTEL'.

● ke halaman 15

Dodok Tempel

● Sambungan Hal 9

Ia lantas menyertak masuk ke batas taman untuk menempelkan kertas tersebut tepat menutupi tulisan kota yang tersemat dalam kata wali kota. Tampaklah susunan kalimat tersebut berbunyi Walihotel Yogyakarta.

Tak berhenti sampai di sana, pria yang juga dikenal sebagai aktivis Jogja Ora Didol itu lantas mengambil potongan kardas dan melingkarkannya ke pinggang. Kini ia berbalutkan kardus dari perut hingga lutut di sisi samping, sementara bagian depan dibiarkan terbuka.

Dodok kemudian menghadap ke arah tulisan hotel yang baru ia tempel. Tak ada yang menyangka bila sejeurus kemudian terlihat luncuran air kecil dari dalam kardus yang diarahkan ke papan penanda kantor wali kota tersebut, melintang tembok khususnya di bagian tulisan hotel yang baru tersemat.

Menyudahi aksinya, ia mengambil sasi kantong plastik berukuran sedang garam kasar yang ia simpan di trotoar. Dengan penuh kekhayusan dan konsisten dengan sikap diamnya ketika melangsungkan aksi, ia mulai menaburkan garam ke sekeliling papan hingga seluruh area tertutup.

Tidak pas
Rampung dengan serangkaian aksi tersebut, Dodok mulai angkat suara ke awak media yang sejak awal memperhatikan kegiatannya. Ia menuturkannya, ritual tersebut dilakukan lantaran kebijakan moratorium hotel dinilai tidak pas. Ia pun menggelar ritual untuk menghilangkan dan mengusir aura negatif. "Moratorium dimulai

tahun 2014 sampai 31 Desember 2018 kemarin. Kalau niat Pak Wali baik, ia akan memperpanjang moratorium tersebut hingga 2022," beberrnya.

Ia pun menyangkan tidak ada penurunan terkait evaluasi moratorium dari 2014-2018 yang disampaikan oleh Pemerintah Kota. Menurut masyarakat berhak mengetahui apa saja dampak yang sudah ada dan dirasakan hingga saat ini. "Hotel bintang 1-3 sudah terjadi. Dan yang dialami saat ini Yogya jadi macet," ucapnya.

Tak hanya itu, dampak yang dirasakan warga pun lebih akan berefek panjang. Rumah mereka yang terhalang oleh gedung tinggi, merampas hak mereka untuk mendapatkan sinar matahari pagi. Dodok menuturkannya, air tanah juga akan menyusut meski pemerintah mengharuskan seluruh hotel nantinya menggunakan air dari PDAM dan bukan dari sumur dalam lagi.

"Pada 2014, mliran kering karena Fave pakai air tanah. Sekarang Hariyadi bilang seluruh hotel enggak boleh air tanah tapi pakai PDAM. Ini pembodohan. PDAM ini pake air tanah. Beda kalau di Jakarta PDAM pakai air kali. Kalau di sini bukan mengelola sungai gede, misal Cajahwong, Code, Winongo untuk sumber air hotel," tandasnya.

Merampas oksigen
Dodok juga mengatakan bahwa keberadaan hotel merampas oksigen. Pasalnya mereka menyediakan ratusan kamar dan tidak mengimbangi dengan aksi menanam pohon.

"Kalau rumsunya 1 pohon menyediakan okaigen untuk 2 orang, maka mereka mendirikan ratusan kamar

dan tidak menanam pohon," tuturnya.

Terkait aksinya tersebut, Dodok mengatakan bukan kali pertama. Februari 2016, warga Miliran melakukan ritual mandi air kembar 7 rupa dari 7 sumur di depan Kompleks Balai Kota Yogyakarta, untuk menolak bala yang lahir dari dosa para pemimpin Yogyakarta yang telah menyalahi tatanan kehidupan.

Mei 2018, prosesi ruwatan untuk bumi Yogyakarta kembali digelar, dengan ditarikannya Bedhaya Banyu neng Segara oleh para penari dari Pendapa SangArt. Tarian *bedhaya* yang sakral ditarikan di depan Balai Kota Yogyakarta oleh 7 perempuan untuk mendoakan bumi yang dipijak sebagai tempat bernaung, hidup, dan mati.

Lalu, di awal 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta membuka kembali izin pembangunan hotel berbintang demi alasan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Padahal, daya dukung lingkungan kota ini sudah begitu terbebani dengan pembangunan 88 hotel baru sejak 2014, serta pembangunan sejumlah apartemen sejak 2016," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Terbatas
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa dengan terbitnya Perwal tersebut, maka izin pembangunan hotel kembali dibuka. Hanya saja terbatas untuk hotel bintang 4, hotel bintang 5, serta *guest house* atau *home stay*.

Ia menyebutkan, saat ini total hotel maupun penginapan di Kota Yogyakarta yang terdapat berjumlah 624 unit. Jumlah tersebut terdiri dari hotel bintang 5 sejumlah 4 hotel, bintang 4 sejumlah 14 hotel, bintang 3 sejumlah 30 hotel, bintang 2 sejumlah 19 hotel, bintang 1 sejumlah 19 hotel, Melati 3 sebanyak 29 hotel, Melati 2 sebanyak 43 hotel, dan kosmen 152 buah.

"Semua itu memiliki kapasitas 14-20 ribu. Sementara saat liburan Natal dan tahun baru kemarin semua hotel penuh. Bahkan saya dengan ajudan memunculkan wisatawan di 5-6 mobil harus *nginap* di SPBU. Artinya pada hari libur, Yogya sampai menolak tamu," beberrnya dalam jumpa pers mengenai moratorium, di Ruang Sadewa Balai Kota Yogyakarta.

Selain terkait lonjakan wisatawan, Heroe juga menyebut perihal potensi New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang dijadwalkan beroperasi perdana pada 2019 ini.

"Kami juga melihat kondisi strategis bahwa triwilan pertama harapannya akan memiliki bandara baru. Bandara Adisutjipto saat ini membawa 7.000-8.000 penumpang per hari biasa. Bandara baru ini harapannya bisa 15-25ribu orang per harinya," ujarnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi itu, lanjutnya, serta kondisi strategis dan pertumbuhan penumpang, maka potensi muncul pada bandara baru serta fasilitas wisatawan.

"Pada 2019 kami akan membuka izin mendirikan hotel, tapi sangat terbatas. Terutama membuka untuk bintang 4 dan 5 serta *guest house*," ujarnya. (Kurniatul Hidayah)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Negatif | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | | | |

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005